

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali: Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan



Picture: Designed by Freepik

Edisi Bahasa Indonesia

Juanita Elias
Chusnul Mar'iyah
Lena Rethel
Reni Suwarso
Lisa Tilley
Caryl Thompson

-Kata Pengantar-
Chusnul Mar'iyah



Toolkit Pemberdayaan
Perempuan dalam Proses
Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung
dan Partisipasi Perempuan

Kata pengantar

Mulai tahun 2015 Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menjalin kerjasama dengan Warwick University untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pengembangan dosen, konferensi dan kegiatan akademis lainnya. CEPP bertekad agar dapat berkontribusi dalam perdebatan akademis untuk memajukan isu - isu yang berhubungan dengan kebijakan2 partai politik terutama isu gender, di dalamnya termasuk upaya memajukan partisipasi dan representasi perempuan dalam proses2 pengambilan kebijakan.

Untuk itu melalui kerjasama penelitian ini dihasilkan panduan yang berjudul Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali: Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan. Toolkit sangat penting bagi pemegang kuasa di tingkat perkotaan pada khususnya dan juga Pemerintahan Nasional sebagai acuan dalam implementasi kebijakan penataan pemukiman. Penggusuran daerah kampung atau kawasan kumuh di kota-kota besar dianggap sebagai harga dari wajah pembangunan fisik. Tidak jarang pula, memunculkan efek negatif, terutama bagi mereka yang terdampak kebijakan. Sementara dalam konstitusi kita menyejahterakan rakyat (bisa dalam bentuk fisik lahiriyah) dan mencerdaskan bangsa dalam bentuk batiniah menjadi visi

kebangsaan dan negara Indonesia. Apalagi bila bicara tentang keadilan gender dalam konteks sejahtera dan mencerdaskan tersebut masih tetap harus diperjuangkan.

Panduan ini merupakan hasil penelitian antara CEPP dengan Warwick University yang berjudul *The Empowerment of Women-Headed Household in Jakarta's Slum Area: Achieving Gender Equality and Creating Inclusive, Safe, and Sustainable Settlement*.

Panduan ini dapat menjadi pegangan bagi semua pengambil kebijakan baik politisi, maupun elit birokrat serta para akademisi.

Terima kasih kepada Tim CEPP, Reni Suwarso, Ph.D dan Dr. Agus Yoni. Tim Warwick; Juanita, Lena Lisa Thompson. Dan terima kasih kepada para peneliti Jamalianuri, Irhamna, Adin, Hasbi Rofiqi, Prasetyo beserta seluruh pihak yang membantu jalannya penelitian ini. Bersama tim Warwick.

Jakarta

Chusnul mariyah

Pengantar

Dunia yang kita huni ini sudah semakin terurbanisasi dengan semakin banyaknya proporsi penduduk dunia yang bermukim di kota-kota kecil dan besar. Rumah bagi banyak warga miskin perkotaan, khususnya di Bumi belahan Selatan, sering kali terletak di wilayah hunian informal atau pemukiman kumuh. Dengan semakin tingginya persaingan atas kepemilikan lahan, para pemukim miskin perkotaan, tanpa memiliki hak-hak formal, sering kali menghadapi ancaman pengusiran paksa atau sukarela. Namun, bagi sementara kalangan, sejumlah inisiatif tengah diperkenalkan dan ditujukan pada perbaikan peri kehidupan dengan kesempatan untuk meningkatkan wilayah pemukiman kumuh atau pemukiman kembali ke perumahan alternatif. Walaupun ada hasil positif dari inisiatif ini, termasuk keuntungan material seperti perumahan yang lebih baik, perbaikan sanitasi dan akses kepada berbagai layanan, seringkali perencanaan dan penerapannya sedikit sekali mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka yang paling terkena dampaknya, terutama kaum perempuan, yang pengalaman dan urusannya seringkali berbeda dari kaum laki-laki. *Toolkit* ini berusaha untuk membantu memperbaiki ketimpangan ini dengan menawarkan usulan-usulan praktis untuk sebuah pendekatan yang lebih inklusif yang menempatkan perempuan di tengah tahapan-tahapan proses pemukiman kembali pasca pengusiran.

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

Toolkit ini beranjak dari riset kolaboratif antara University of Warwick dan Universitas Indonesia yang menitikberatkan pada dampak proyek pemukiman kembali kaum perempuan berpenghasilan rendah yang menghuni komunitas kampung kota di Jakarta.

Daftar Isi

Kata pengantar	1
Pengantar	3
Ringkasan Eksekutif	6
1 Pendahuluan: Konteks dan Kerangka kerja	8
1.1 Mengapa menyediakan <i>toolkit</i> ?	8
1.2 Untuk siapa <i>toolkit</i> ini?.....	8
1.3 Mencakup apa sajakah <i>toolkit</i> ini?.....	8
1.4 Bagaimanakah sebaiknya <i>toolkit</i> ini digunakan?.....	8
1.5 Mengapa penting mempertimbangkan gender dalam perencanaan pemukiman kembali?	9
1.6 Apakah itu Pengarusutamaan Gender?.....	12
1.7 Ketidakadilan gender apa yang dihadapi oleh kaum perempuan miskin kota?.....	14
2 Mengintegrasikan Perempuan ke dalam Proses Penggusuran dan Pemukiman kembali	15
2.1 Apakah tahapan kunci dalam proses penggusuran dan pemukiman kembali?	15
3 Persiapan dan Perencanaan	16
3.1 Mengidentifikasi Para Pemangku Kepentingan.	16
3.2 Konsultasi dan Partisipasi.....	17
3.3 Pengumpulan Data	19
3.4 Memprioritaskan Kebutuhan dan Persyaratan.	21
4 Implementasi	23
5 Monitoring dan Evaluasi	25
6 Rujukan	26
7 Sumber Lainnya	26

Ringkasan Eksekutif

Sasaran dari *toolkit* ini adalah untuk mendorong pendekatan yang inklusif dan partisipatoris bagi skema pemukiman kembali kawasan urban yang berdampak kepada kaum miskin. Dengan sarasannya para praktisi, termasuk para perencana tata kota serta komunitas yang terkena dampak pemukiman kembali, *toolkit* ini memberikan pedoman untuk menyatukan kebutuhan kaum perempuan ke dalam setiap tahapan proses pemukiman kembali.

Dengan mengakui bahwa setiap perempuan sangat sering memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda dari kaum laki-laki dan sebagai akibatnya adalah adanya kebutuhan dan persyaratan yang berbeda, maka *toolkit* ini berusaha untuk menangani asimetri dan diskriminasi yang dihadapi kaum perempuan dan mendorong pengarusutamaan gender dengan cara menggarisbawahi bagaimana keperluan dan sudut pandang kaum perempuan dapat digabungkan secara lebih efektif ke dalam semua tahapan proses pemukiman kembali. Di saat yang sama, perlu diakui bahwa kaum perempuan bukanlah suatu entitas homogen, melainkan terdiferensiasi oleh faktor-faktor sosio-ekonomi seperti usia, ras dan suku, status perkawinan, disabilitas dan jenjang penghasilan. Walaupun tidak meliputi semua aspek strategis dan operasional dalam upaya pemukiman kembali, *toolkit* ini memiliki sasaran untuk menyatakan mengapa penting untuk mempertimbangkan aspek gender pada setiap tahapan proses dan memberikan pendekatan langkah demi langkah dalam menyertakan kaum perempuan pada tahap persiapan, perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pemukiman kembali pasca penggusuran.

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

Toolkit ini memberikan panduan untuk memberdayakan kaum perempuan dalam situasi upaya pemukiman kembali, diantaranya termasuk:

- Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dari kalangan perempuan di awal tahapan,
- Mendorong kaum perempuan untuk ambil bagian dalam konsultasi dan mengatasi rintangan terhadap partisipasi mereka,
- Memastikan pengumpulan data yang sesuai dengan prinsip kesetaraan gender,
- Memprioritaskan kebutuhan dan persyaratan kaum perempuan, termasuk aspek keselamatan dan mata pencaharian,
- Memastikan transisi yang mulus menempati perumahan dalam upaya pemukiman kembali selama tahap implementasi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kaum perempuan,
- Membuat mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja hasil pemukiman kembali dan mengukur dampaknya terhadap kaum perempuan yang terkena imbasnya.

1 Pendahuluan: Konteks dan Kerangka kerja

1.1 Mengapa menyediakan *toolkit*?

Toolkit ini telah dikembangkan untuk menyertakan kebutuhan kaum perempuan ke dalam setiap tahapan proses pemukiman kembali serta juga membantu aktivis kaum miskin kota untuk menghadapi tantangan dampak terburuk dari pemukiman kembali perkotaan.

1.2 Untuk siapa *toolkit* ini?

Toolkit ini ditujukan bagi para praktisi, termasuk para perencana tata kota, yang bertanggungjawab dalam mengambil keputusan untuk relokasi kaum miskin kota. *Toolkit* ini juga dapat digunakan untuk tujuan advokasi bagi komunitas yang mengalami penggusuran, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *community-organizer* serta aktivis akar-rumput yang bekerja atas nama mereka.

1.3 Mencakup apa sajakah *toolkit* ini?

Toolkit ini mencakup sejumlah usulan dan panduan praktis untuk menyertakan pengarusutamaan gender ke dalam rencana dan proses pemukiman kembali.

1.4 Bagaimanakah sebaiknya *toolkit* ini digunakan?

Setiap situasi pemukiman kembali adalah berbeda. *Toolkit* ini berfokus pada suatu aspek tertentu dari proses pemukiman kembali, yaitu memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan diakui dan masuk hitungan dalam aspek perencanaan dan operasional dari relokasi. Maka, *toolkit* ini tidaklah terlalu mendalam dan sebaiknya diadaptasi untuk keadaan lokal setiap situasi pemukiman kembali. Yang mendasari *toolkit* ini adalah suatu komitmen bahwa (a) pemukiman

kembali perlu benar-benar bersifat partisipatoris dan menempatkan kebutuhan kaum miskin kota, dan khususnya kaum perempuan miskin, pada bagian intinya; dan (b) bahwa partisipasi merupakan hal sentral demi menghindari penggusuran paksa yang tidak hanya menciptakan hilangnya harta benda dalam jumlah yang besar, tapi juga pelanggaran banyak peraturan resmi lokal dan internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk urusan Hak Asasi Manusia (UNHCR): 'Penggusuran paksa merupakan pelanggaran besar terhadap serangkaian hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan perumahan, makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keselamatan diri, kebebasan dari kekejaman, perlakuan keji dan menghina, serta kebebasan bergerak'ⁱ.

1.5 Mengapa penting mempertimbangkan gender dalam perencanaan pemukiman kembali?

- Jurang ketidaksetaraan gender dapat semakin bertambah lebar dan hubungan gender dapat memburuk selama masa pemukiman kembali – contohnya jika skema pemukiman kembali gagal mengakui kegiatan ekonomi informal kaum perempuan dan juga kebutuhan mereka untuk terus memperoleh akses untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan.
- Kaum perempuan tidak boleh memiliki hak atas tanah dan atau properti yang membuat mereka rentan khususnya selama masa

pemukiman kembali dan tidak menyertakan mereka dari kesepakatan ganti rugi.

- Kaum perempuan sering kali bekerja di sektor informal, sering berbasis tempat tinggal, atau pekerjaan semi rumahan, sehingga kehilangan tempat tinggal dapat menjadi kendala bagi kemampuan mereka menghasilkan pendapatan dan bagi terjaminnya keberlangsungan nafkah mereka.
- Skema pemukiman kembali sering kali menjadi beban yang berat bagi kaum perempuan untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja, dan mereka sangat besar kemungkinannya menghadapi bahaya dan pelecehan dibandingkan kaum laki-laki ketika mereka melakukan perjalanan ke tempat kerja dalam jarak yang cukup jauh dan sangat tergantung pada sarana angkutan umum.
- Rusaknya komunitas dan jejaring sosial akibat penggusuran dan pemukiman kembali cenderung berdampak terhadap kaum perempuan daripada laki-laki. Ikatan jejaring sosial ini merupakan sumber dukungan utama di saat krisis dan menyediakan keamanan rumah tangga.
- Ketidaksetaraan gender sering kali mengakibatkan kaum perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan dan tekanan psikis. Suatu situasi yang melibatkan tekanan ekonomi dan sosial seperti upaya pemukiman kembali mampu meningkatkan

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

kerentanan pada kaum perempuan dewasa dan remaja terhadap kekerasan.

- Efek negatif dari pemukiman kembali kaum perempuan mempunyai pengaruh lebih luas pada kesejahteraan keluarga, khususnya anak-anak dan anggota keluarga yang lebih tua yang bergantung pada perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga perempuan.

(lihat juga: E. Ganguli, R. Jayewardene dan S. Latif, 2003, h.2).

1.6 Apakah itu Pengarusutamaan Gender?

“Pengarusutamaan Gender adalah proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki atas segala tindakan yang direncanakan, termasuk legislasi, penyusunan kebijakan, atau program, di semua wilayah dan semua tingkatan. Ini merupakan strategi untuk membuat apa yang dianggap penting oleh kaum perempuan setara dengan apa yang dianggap penting kaum laki-laki, sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, dan pengawasan serta evaluasi kebijakan dan program. Pengarusutamaan ini beranjak untuk menempati semua ruang politik, ekonomi dan masyarakat sehingga kaum perempuan dan laki-laki memperoleh keuntungan yang seimbang, dan ketidaksetaraan tidak merebak. Sederhananya, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kesetaraan gender dengan mentransformasi aspek-aspek arus utama.”

(UN Habitat, 2012, h.46).

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah pendekatan yang telah diadopsi secara luas di berbagai ragam lembaga internasional, swasta dan lembaga negara. Masalah pengarusutamaan gender yang memastikan bahwa dampak kebijakan tertentu pada kaum perempuan dan laki-laki (dan hubungan antara gender) itu sepenuhnya dicatat, bahwa dampak kebijakan terhadap hubungan gender terus menerus diawasi dan, pada akhirnya, bahwa transformasi besar yang dipraktikkan itu

dapat terwujud. Pengarusutamaan gender tidak harus tentang pembuatan kebijakan yang secara khusus ditujukan kepada kebutuhan kaum perempuan – tapi berusaha menanggapi gambaran yang lebih besar, mengamati wilayah kebijakan atau intervensi apapun sebagai sesuatu yang selalu memiliki konsekuensi besar yang berbeda bagi kaum laki-laki dan perempuan disebabkan adanya ketidaksetaraan gender di dalam masyarakat. Akan tetapi, pengarusutamaan gender merupakan sebuah pendekatan yang *transformatif* – yaitu yang berupaya mengimplementasi kebijakan dengan cara-cara yang dapat menangani permasalahan mendasar dari ketidaksetaraan gender.

Perencanaan tata kota merupakan sebuah contoh penting dimana intervensi kebijakan dan keputusan perencanaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang penting menyangkut gender. Upaya pemukiman kembali melibatkan relokasi anggota rumah tangga, tapi mereka ini akan mengalami pemukiman kembali dengan cara yang amat berbeda – namun sangat kecil kemungkinannya para perencana tata kota akan mempertimbangkan segala penilaian atas konsekuensi gender dari program-program seperti ini. Apa yang dikemukakan di *toolkit* ini adalah upaya kita untuk menangani kesenjangan kebijakan ini.

1.7 Ketidakadilan gender apa yang dihadapi oleh kaum perempuan miskin kota?

Sementara pengalaman kaum perempuan dalam kehidupan perkotaan sangat bergantung pada sejumlah faktor seperti kelas sosial, pendapatan, usia, tingkat pendidikan dan status pernikahan, di sisi lain kaum perempuan miskin kota menghadapi ketidaksetaraan multi-dimensi berdasarkan pada gender mereka yang memperparah ketidakamanan dan kerentanan mereka. Contohnya:

Pemerintahan

Di beberapa negara hak-hak legislatif yang tidak setara dan diskriminatif mencegah atau menghambat kepemilikan tanah dan/atau properti sehingga mengakibatkan ketergantungan pada kaum lelaki

Ekonomi

- Kaum perempuan lebih mungkin untuk partisipasi dalam pekerjaan informal, berbayar rendah, kasar dan tidak aman yang seringkali dilakukan di rumah.
- Kurangnya akses untuk kredit dan keuangan

Domestik

- Asimetri gender dalam peran dan tanggungjawab yang dilakukan kaum lelaki dan perempuan di rumah - yang umumnya berarti bahwa kaum perempuan bertanggung jawab untuk tugas reproduktif domestik tanpa digaji seperti menampung air, mencari bahan bakar, membuang sampah, memasak, membersihkan rumah dan merawat anak, orang sakit dan manula yang membuat mereka miskin waktu.

Keamanan

- Kaum perempuan lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan verbal, fisik dan seks.

Transportasi

- Kaum perempuan seringkali memiliki persyaratan transportasi yang berbeda dari kaum lelaki – Ketersediaan sarana angkutan umum yang fleksibel dan murah merupakan hal yang esensial bagi kaum perempuan agar mereka dapat menjalankan peran reproduktif dan buruh mereka tapi sering dijadwalkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lelaki

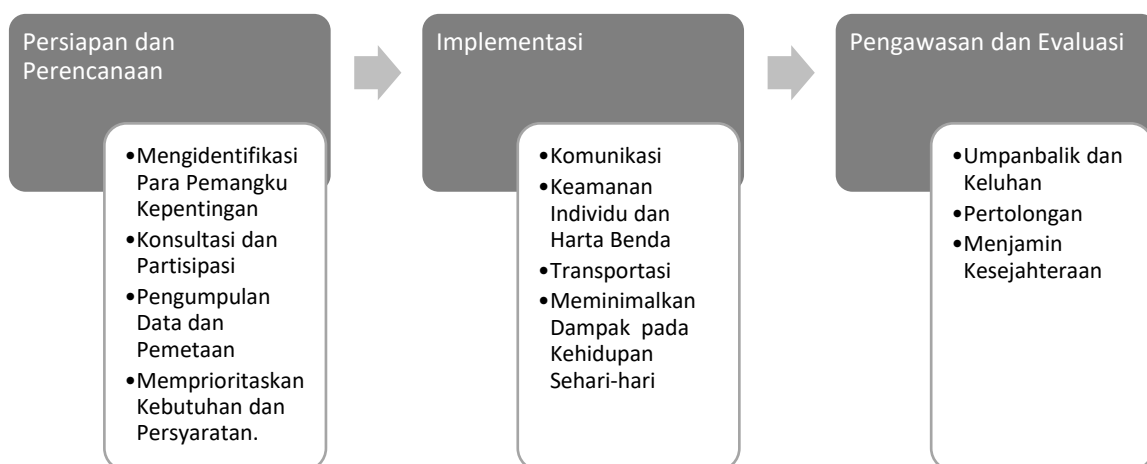
2 Mengintegrasikan Perempuan ke dalam Proses Pengurusan dan Pemukiman kembali

2.1 Apakah tahapan kunci dalam proses pengurusan dan pemukiman kembali?

Tahapan kunci dalam pemukiman kembali suatu komunitas setelah pengusiran adalah:

- Persiapan dan Perencanaan
- Implementasi
- Monitoring dan Evaluasi

Guna mengarusutamakan gender ke dalam proses, kaum perempuan perlu disertakan ke dalam setiap tahapan.



3 Persiapan dan Perencanaan

3.1 Mengidentifikasi Para Pemangku Kepentingan.

Sebuah program pemukiman kembali yang inklusif seharusnya mengakui kebutuhan akan kesetaraan dan konsultasi serta partisipasi bermakna dari kaum laki-laki maupun perempuan yang terkena dampak relokasi dan oleh karenanya berupaya untuk mengikutsertakan para pemangku kepentingan dari kedua gender. Hal ini disebabkan faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang dialami oleh kaum perempuan tidak diperhatikan dan kaum perempuan sendiri tidak dimasukkan dalam rencana relokasi dan prosedur serta proses implementasinya. Menyertakan kaum perempuan dalam proses tersebut adalah suatu komitmen yang harus dilakukan oleh para perencana tata kota. Sebagaimana disampaikan Ganguli, Jayewardene dan Lateef:

“Faktor sosial dan budaya mungkin mengesampingkan kaum perempuan dari keikutsertaan secara aktif dalam perencanaan, penerapan dan pelaksanaan kegiatan *pemukiman kembali*. Perlu dilakukan upaya khusus untuk memastikan keikutsertaan mereka. Seringkali para perencana bekerja melalui para elit kaum laki-laki, yang mungkin tidak mewakili keseluruhan komunitas khususnya kalangan perempuan. Kecuali jika partisipasi kaum perempuan bisa dijamin, bias kaum adam dalam administrasi dan sistem legal mungkin merusak hak-hak perempuan di lembaga-lembaga yang lazim dan merugikan kaum perempuan yang rentan. Para janda, kaum manula, perempuan yang bercerai, dan rumah tangga yang dipimpin perempuan akan menderita sebagai akibat dari bias ini.”

(Sumber: E. Ganguli, R. Jayewardene dan S. Latif, 2003, h.7).

Misalnya, survei rumah tangga, mungkin hanya berfokus dengan laki-laki kepala rumah tangga yang pandangannya dan prioritasnya mungkin tidak mewakili anggota keluarga perempuan. Kaum perempuan yang seringkali bertanggung jawab untuk banyak tugas domestik yang tidak digaji seperti menampung air, membuang sampah, memasak, merawat anak, merawat yang sakit dan manula dan juga sering melakukan kerja rumahan yang informal, bergaji rendah, dan kasar, hal-hal tersebut perlu dikonsultasikan di setiap tahapan proses.

3.2 Konsultasi dan Partisipasi.

Agar kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan disertakan dalam perencanaan pemukiman kembali dan partisipasi mereka didorong, maka merupakan hal yang sangat penting bahwa pandangan dan pendapat mereka diperoleh secara langsung. Hal ini dapat dilakukan orang per orang atau melalui masukan dari organisasi perempuan miskin dan organisasi (kaum) perkotaan miskin. Para praktisi seharusnya menyadari kendala yang menghalangi partisipasi kaum perempuan termasuk:

- Norma budaya dan tradisi yang menuntut kaum perempuan hanya dapat berbicara dengan sesama perempuan.
- Pembatasan kemampuan perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan di luar rumah.
- Ketergantungan yang berlebihan pada kelompok elit laki-laki atau laki-laki kepala rumah tangga dalam rangka mewakili pandangan perempuan secara akurat (khususnya tidak termasuk manula,

janda cerai mati, janda cerai hidup dan yang kepala rumah tangganya perempuan).

- Tingkat kemampuan berbahasa (*literary rates*) yang rendah yang menghambat komunikasi.
- Tanggung jawab reproduktif, seperti merawat anak atau manula, pekerjaan rumah yang membatasi keluangan waktu bagi partisipasi kaum perempuan.
- Ongkos angkutan untuk menghadiri pertemuan.
- Format pertemuan seperti rapat umum dimana kaum perempuan merasa terhalangi untuk menyuarakan pendapat mereka.

Meskipun dianggap penting untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam kegiatan konsultasi, para praktisi seharusnya sadar akan beban tambahan yang dihasilkan oleh kegiatan ini terhadap kegiatan sehari-hari kaum perempuan yang sudah cukup sibuk. Agar dapat memfasilitasi keikutsertaan kaum perempuan, pengatur pertemuan sebaiknya memiliki sasaran untuk:

- Menyelenggarakan pertemuan khusus kaum perempuan.
- Mengidentifikasi sosok pemimpin dari kalangan perempuan yang dapat bertindak sebagai juru bicara untuk mewakili pandangan dari mereka yang tidak dapat hadir.
- Menyediakan penitipan anak di tempat pertemuan.
- Memilih tempat dan waktu pertemuan yang nyaman untuk kehadiran kaum perempuan
- Mempekerjakan fasilitator perempuan untuk memimpin diskusi atau mengajukan pertanyaan.

- Mengakui heterogenitas pengalaman kaum perempuan dan menyertakan perempuan dari berbagai ragam latar belakang seperti manula, cacat, janda dan pemimpin rumah tangga.

Pertimbangan Jender Kunci untuk Konsultasi:

- Sudahkah kaum laki-laki dan perempuan dikonsultasikan tentang program pemukiman kembali yang diusulkan?
- Sudahkah pandangan kedua pihak, kaum laki-laki dan perempuan diperoleh untuk mengembangkan rencana pemukiman kembali?
- Sudahkah kaum perempuan dan juga laki-laki dikonsultasikan untuk mengidentifikasi mereka yang terkena dampak pemukiman kembali?
- Sudahkah pertemuan khusus perempuan diselenggarakan untuk mendapatkan pandangan kaum perempuan terpisah dari pendapat kaum laki-laki?
- Sudahkah heterogenitas kaum perempuan di dalam komunitas diperhitungkan sebagai faktor dalam konsultasi dan sepenuhnya diwakili?
- Bagaimanakah rencana kompensasi sudah dikembangkan dan sudahkah kaum perempuan dan laki-laki dikonsultasikan? Bagaimanakah permasalahan tertentu dan biaya secara ekonomi yang dihadapi kaum perempuan sudah disertakan ke dalam kompensasi yang tersedia?

3.3 Pengumpulan Data

Sebuah sensus awal dari semua yang terkena dampak relokasi harus dilakukan sekiranya data tersebut belum tersedia guna mengumpulkan data mengenai ukuran dan komposisi komunitas tersebut. Sensus ini sebaiknya dipilah berdasarkan gender dari setiap kepala rumah tangga termasuk jenis kelamin, usia, status nikah, dan aspek disabilitas.

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

Metoda lebih lanjut untuk mencari fakta pemangku kepentingan sebaiknya dilakukan untuk mengidentifikasi tanggungjawab, persyaratan dan kepentingan mereka yang terkena dampak pemukiman kembali. Kaum perempuan sebaiknya disertakan dalam pengumpulan informasi dan sesi khusus perempuan, dan diharapkan dilakukan oleh perempuan, sebaiknya diselenggarakan untuk memperoleh pandangan yang peka-gender.

Metoda konsultasi yang memungkinkan partisipasi dan kontribusi para pemangku kepentingan yang setara termasuk:

- survei
- kuesioner
- wawancara
- *focus group*

Pengumpulan data sebaiknya juga berbentuk pemetaan partisipatoris atas wilayah peri kehidupan ekonomi yang ditandai untuk pemukiman kembali. Hal ini sebaiknya mempertimbangkan semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi informal serta kontribusi tenaga kerja tak bergaji bagi keamanan dan kesejahteraan keluarga.

3.4 Memprioritaskan Kebutuhan dan Persyaratan.

Kaum perempuan dan laki-laki mungkin memiliki peran dan tanggung jawab domestik yang berbeda yang mungkin akan menyebabkan beragamnya prioritas dan kebutuhan di dalam rumah tangga. Sebaiknya diasumsikan bahwa kaum laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga akan secara akurat mewakili keperluan dan kepentingan perempuan

Pertimbangan Gender Kunci untuk Memprioritaskan Keperluan dan Persyaratan:

- Sudahkah kaum perempuan serta laki-laki disediakan akses untuk melihat lokasi relokasinya?
- Sudahkah urusan yang diungkapkan kaum perempuan dimasukkan dalam perencanaan?
- Apakah kedua gender dikonsultasi tentang keadaan perumahan pemukiman kembalinya?
- Akankah kaum perempuan serta laki-laki diberikan hak hukum atas properti pemukiman kembali?
- Sudahkah permasalahan keamanan diri ditangani, misalnya, audit keselamatan yang mencakup kaum perempuan yang terkena dampak dilakukan?
- Apakah penerangan di tempat umum memadai?
- Apakah ada sumber air yang mudah dijangkau, sanitasi dan pembuangan sampah yang memadai tersedia di lokasi pemukiman kembali?
- Sekolah apa saja yang tersedia di dekat lokasi pemukiman kembali?
- Fasilitas penitipan anak apa saja yang tersedia di dekat lokasi pemukiman kembali?
- Fasilitas medis/kesehatan apa saja yang tersedia di dekat lokasi pemukiman kembali?
- Transportasi umum apa yang tersedia di dekat lokasi pemukiman kembali?
- Apakah kaum perempuan serta laki-laki mendapat kompensasi atas hilangnya mata pencaharian atau properti akibat relokasi?
- Apakah kaum perempuan akan mampu melanjutkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan di rumah untuk mempertahankan mata pencaharian mereka di lokasi pemukiman kembali?
- Bagaimana ikatan sosial komunitas dapat dipelihara di lokasi yang baru? Upaya apa yang akan dilakukan untuk menjamin jejaring sosial dan ikatan komunitas tetap terpelihara dalam desain pemukiman yang baru?

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

selama proses konsultasi. Maka, penting untuk mengkonsultasikan dengan kaum perempuan secara langsung untuk memastikan keperluan dan persyaratan mereka untuk upaya perumahan pemukiman kembali. Penting bahwa perwakilan komunitas dan/atau grup aktivis yang ada sepenuhnya dilibatkan ke dalam proses konsultasi dan bahwa konsultasi sepenuhnya partisipatoris (bukan hanya mencontreng), sehingga warga merasa urusan mereka ditangani sebagaimana mestinya.

4 Implementasi

Upaya pemukiman kembali sebaiknya hanya berlanjut jika ada persetujuan yang memadai dari komunitas atas proposalnya. Implementasi proses pemukiman kembali harus sudah dengan sendirinya dikonsultasikan dengan komunitas lokal termasuk kaum perempuannya. Perencanaan partisipatoris yang memperhatikan kesetaraan gender dapat memastikan bahwa relokasi dan pemukiman kembali dilakukan sesuai dengan keperluan dan aspirasi komunitas miskin kota (lihat juga Patel et al. 2002)

Pertimbangan Gender Kunci untuk Implementasi

Komunikasi

- Sudahkah para pemangku kepentingan, laki-laki dan perempuan, dikonsultasikan tentang waktu yang paling nyaman untuk relokasi?
- Sudahkah mengkomunikasikan pengaturan penggusuran dan pemukiman kembali kepada kaum laki-laki dan perempuan yang terkena dampaknya?

Keselamatan Orang dan Harta Benda

- Sudahkah inventarisasi harta benda dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi kehilangan atau kerusakan?
- Akankah penggusuran diamati secara mandiri untuk memastikan bahwa kaum perempuan tidak terkena kekerasan fisik atau verbal?
- Sudahkah mereka yang mungkin memerlukan bantuan, mis. manula, ortu tunggal, perempuan hamil, diidentifikasi dan dikonsultasikan tentang persyaratan khusus mereka?
- Sudahkah dialokasikan waktu yang memadai bagi mereka yang memerlukannya, mis. manula, penyandang cacat, untuk mengemas harta bendanya?

Transportasi

- Apakah sarana transportasi ke lokasi baru disediakan? Jika ya, sudahkah pengaturan ini dikomunikasikan ke kaum perempuan dan laki-laki yang terkena dampak dan apakah mereka juga dikonsultasi tentang pengaturan yang sesuai dengan keinginan mereka?
- Jika transportasi tidak disediakan, bagaimanakah mereka yang terkena dampak diharapkan dapat membawa diri mereka, keluarga mereka, dan harta benda mereka ke lokasi yang baru? Akankah mereka diharapkan membayar biaya transportasi atau mereka akan mendapat kompensasi?
- Sudahkah mereka yang mungkin memiliki masalah keleluasaan bergerak, mis. manula dan penyandang cacat, dimasukkan dalam pengaturan transportasi?

Meminimalkan Dampak pada Kehidupan Sehari-hari.

- Apakah lokasi pemukiman ulang siap untuk ditempati? Apakah misalnya fasilitas seperti air, energi listrik, fasilitas memasak, pembuangan sampah dan sanitasi tersedia?
- Sudahkah anak-anak ditempatkan di sekolah setempat guna menghindari terganggunya pendidikan mereka?
- Sudahkah diambil langkah-langkah untuk memastikan gangguan minimum terhadap kemampuan kaum perempuan untuk terus menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan dilakukan di rumah?

5 Monitoring dan Evaluasi

Guna memastikan bahwa proses pemukiman kembali berjalan lancar dan efektif dan meminimalkan gangguan terhadap semua pihak, pemantauan

Pertimbangan Gender Kunci untuk Monitoring dan Evaluasi Umpanbalik dan Keluhan

- Adakah mekanisme umpanbalik di seluruh proses relokasi agar kaum laki-laki dan perempuan dapat menyuarkan urusan mereka tentang perkembangannya.

Pertolongan

- Kompensasi apa yang tersedia bagi biaya atau kerusakan yang terjadi akibat pemukiman kembali?
- Jika ada kompensasi, siapa yang akan mendapatkannya? Laki-laki kepala rumah tangga, bersama, atau kaum perempuan.
- Siapa yang menilai klaim kompensasi dan apakah prosedurnya berimbang secara gender?

Memastikan Kesejahteraan

- Sudahkah terdapat dampak negatif apapun terhadap kapasitas nafkah dan sumber pendapatan kaum laki-laki dan perempuan akibat dari pemukiman kembali?
- Dampak apakah yang diakibatkan pemukiman kembali bagi jejaring komunitas dan interaksi sosial kaum perempuan?

proses secara berkala dan evaluasi pasca pemukiman kembali harus dilakukan. Hal ini harus mencakup audit khusus gender yang mengevaluasi apakah keperluan, kepentingan dan harapan kaum laki-laki dan perempuan telah dicapai dan untuk menilai dan menangani segala dampak negatif. Penilaian harus imbang bagi setiap gender, untuk mencegah restriksi budaya dalam komunikasi perempuan dengan laki-laki dan mendorong masukan dari kaum perempuan yang terkena dampak pemukiman kembali.

6 Rujukan

Elias, J., Ma'riyah, C., Rethel, L., Suwarso, R. and Tilley, L. (2018) *The Gendered Everyday Political Economy of Kampung Eviction and Resettlement in Jakarta: Final Project Report*. Coventry: The University of Warwick, 25 March.

Ganguli, E. Jayewardene, R. and Latif, S. (2003). *Gender Checklist: Resettlement*. Manila: Asian Development Bank.

Patel, S., d'Cruz, C., and Burra, S. (2002) 'Beyond Evictions in a Global City: People-managed Resettlement in Mumbai' *Environment & Urbanization* 14(1): 159-172.

UN-Habitat. (2012). *Gender Issue Guide: Housing and Slum Upgrading*. UN-Habitat: Nairobi.

7 Sumber Lainnya

Handbook dan Manual

Asian Development Bank. (2017). *Enabling Inclusive Cities: Tool Kit for Inclusive Urban Development*. Metro Manila.

Care International UK. (2016). *Gender & Shelter: Good Programming Guidelines*. London.

Enakshi Ganguli; Ruwani Jayewardene and Shireen Latif. (2003). *Gender Checklist: Resettlement*. Asian Development Bank.

Surabhi Tandon Mehrotra. (2010). *A Handbook on Women's Safety Audits in Low-income Urban Neighbourhoods: A Focus on Essential Services*. Jagori/Women in Cities International: New Delhi.

The World Bank. (2010). *Social Development & Infrastructure: Making Urban Development Work for Women and Men Tools for Task Teams*. Washington DC.

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

UN Human Rights Office of the High Commissioner. (2012). *Women and the Right to Adequate Housing*. New York and Geneva.

UN-Habitat. (2011). *Losing Your Home: Assessing the Impact of Eviction*. Nairobi.

UN-Habitat. (2012). *Gender and Urban Planning: Issues and Trends*. Nairobi.

UN-Habitat. (2012). *Gender Issue Guide: Housing and Slum Upgrading*. Nairobi.

UN-Habitat. (2014). *Assessing the Impact of Eviction*. Nairobi.

Women in Cities International and UN-Habitat. (n.d.). *Women's Safety Audits: What Works and Where?* Nairobi.

Websites

Care. Gender Toolkit [Online]. Available at:
<http://gendertoolkit.care.org/default.aspx> [Accessed 15 February 2018].

Housing and Land Rights Network. The Housing and Land Rights monitoring Toolkit [Online]. Available at: <http://www.hlrn.org/toolkit/English/start.htm> [Accessed 5 February 2018].

Practical Action. (2018). Available at: <https://practicalaction.org/> [Accessed 4 February 2018].

The Society for the Promotion of Area Resource Centers (SPARC). (2014). Available at: <http://www.sparcindia.org/index.php> [Accessed 3 February 2018].

Tools4dev - Practical Tools for international development. Available at:
<http://www.tools4dev.org/> [Accessed 15 January 2018].

UN-Habitat and World Urban Campaign. (2016). *I'm A City Changer: Gender Toolkit* [Online]. Available at:
https://issuu.com/worldurbancampaign/docs/gender_city_toolkit_web [Accessed 3 February 2018].

Toolkit Pemberdayaan Perempuan dalam Proses Pemukiman Kembali:
Pemindahan Warga Kampung dan Partisipasi Perempuan

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011). Forced Evictions Assessment Questionnaire [Online]. Available at: http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/ForcedEvictions/ForcedEvictionsAssessmentQuestionnaire.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 [Accessed 4 February 2018].

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. The Right to Adequate Housing Toolkit [Online]. Available at: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx> [Accessed 4 February 2018].

Witness. A Witness Program: Forced Evictions [Online]. Available at: <https://fe.witness.org/> [Accessed 3 February 2018].

ⁱ see <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx>